

# CATRA

MENGAYOMI DAN MENCERDASKAN

MAJALAH SETJEN WANTANNAS



EDISI XXI  
DESEMBER 2017



# BELA NEGARA



## SALAM REDAKSI

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian  
Om Swastyastu  
Shalom

Pembaca Catra yang terhormat, cuti bersama sudah di depan mata yaitu tanggal 25 dan 26 Desember 2017 dilanjutkan libur tahun baru 2018. Selamat memperingati dan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 1 Desember 2017 (12 Rabiul Awal 1349 H), dan Selamat Hari Natal 25 Desember 2017 serta Selamat Tahun Baru 2018. Tanpa terasa usia kita pun bertambah, berkurang pula "jatah umur" di planet bumi ini. Jika tiba waktunya nanti, bersiaplah memasuki pintu gerbang tanpa batas, kehidupan yang abadi.

Berbagai pencapaian telah berhasil kita raih di tahun 2017 ini, membanggakan atau mengecewakan, patut kita bersyukur kepadaNya yang selalu membimbing dan mengasihi kita. Kesalahan dan kegagalan, suka dan duka, jatuh dan bangun adalah hal yang biasa dalam siklus kehidupan. Belajarlah dari pengalaman, karena itulah guru yang terbaik. Selalu mawas diri dan lakukan evaluasi diri, agar tidak terjatuh pada lubang yang sama, apalagi sampai berulang kali. Lanjutkan prestasi, terus berkarya, berbagi, berkreasi, berinovasi dan bersinergi.

Semoga dapat diraih asa dan harapan di tahun yang baru nanti. Semoga.....

REDAKSI



Redaksi

**MAJALAH CATRA**

Jl. Medan Merdeka Barat No.15  
Jakarta Pusat - 10110

Telp. 021- 3863983 Fax 021-3441683

email: rodangmas@dkn.go.id

# DAFTAR ISI

## Inspirasi Bulan Ini

### OPINI



- 4 MELESTARIKAN TRADISI GOTONG ROTONG SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KESETIAKAWANAN NASIONAL



- 6 KETAHANAN PANGAN ADALAH KETAHANAN NASIONAL

### TAJUK UTAMA



- 9 BELA NEGARA: DARI SIAPA DAN UNTUK APA?

### KEBIJAKAN PEMERINTAH



- 14 PRESPRES NO.133 TAHUN 2017 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

### INFO KITA



- 16 SETJEN WANTANNAS RAIH PERINGKAT KE-VI PENGANUGERAHAN KIP TAHUN 2017



- 18 SETJEN WANTANNAS MENUJU PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK



- 20 RAKOR WANTANNAS: PEMBINAAN BELA NEGARA MELALUI GERAKAN NASIONAL BELA NEGARA

## KISAH ARLOJI YANG HILANG

Ada seorang tukang kayu. Suatu saat ketika sedang bekerja, secara tak disengaja arlojinya terjatuh dan terbenam di antara tingginya tumpukan serbuk kayu. Arloji itu adalah sebuah hadiah dan telah dipakainya cukup lama. Ia amat mencintai arloji tersebut. Karenanya ia berusaha sedapat mungkin untuk menemukan kembali arlojinya. Sambil mengeluh mempersalahkan keteledoran diri sendiri si tukang kayu itu membongkar tumpukan serbuk yang tinggi itu.

Teman-teman pekerja yang lain juga turut membantu mencarinya. Namun sia-sia saja. Arloji kesayangan itu tetap tak ditemukan. Tibalah saat makan siang. Para pekerja serta pemilik arloji tersebut dengan semangat yang lesu meninggalkan bengkel kayu tersebut.

Saat itu seorang anak yang sejak tadi memperhatikan mereka mencari arloji itu, datang mendekati tumpukan serbuk kayu tersebut. Ia menjongkok dan mencari. Tak berapa lama berselang ia telah menemukan kembali arloji kesayangan si tukang kayu tersebut. Tentu si tukang kayu itu amat gembira. Namun ia juga heran, karena sebelumnya banyak orang telah membongkar tumpukan serbuk namun sia-sia. Tapi anak ini cuma seorang diri saja, dan berhasil menemukan arloji itu.

"Bagaimana caranya engkau mencari arloji ini?", tanya si tukang kayu.

"Saya hanya duduk secara tenang di lantai. Dalam keheningan itu saya bisa mendengar bunyi tik-tak, tik-tak. Dengan itu saya tahu di mana arloji itu berada", jawab anak itu.

Keheningan adalah pekerjaan rumah yang paling sulit diselesaikan selama hidup. Sering secara tidak sadar kita terjerumus dalam seribu satu macam 'kesibukan dan kegaduhan'. Ada baiknya kita menenangkan diri kita terlebih dahulu sebelum mulai melangkah menghadapi setiap permasalahan. "Segenggam ketenangan lebih baik dari pada dua genggam jerih payah dan usaha menjaring angin."



**KESETIAKAWANAN SOSIAL**  
*Perekat* **KEBERAGAMAN**



## MELESTARIKAN TRADISI GOTONG ROYONG SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KESETIAKAWANAN SOSIAL

Oleh: Jumari Haryadi

**M**anusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tanpa orang lain, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengapa demikian? Karena manusia dilahirkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dengan sosialisasi dan saling menjaga hubungan baik, maka kekurangan itu bisa ditutupinya dari orang lain.

Jiwa sosial bangsa Indonesia sudah ada sejak dulu sebagai peninggalan dari para leluhur. Salah satu contohnya adalah peristiwa perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah di tanah air. Kalau saat itu bangsa Indonesia tidak peduli kepada sesamanya dan hanya mementingkan diri sendiri, maka belum tentu penjajahan di bumi Indonesia bisa diberantas sampai tuntas.

Rasa senasib bangsa Indonesia ketika berada dalam belenggu penjajahan, telah menimbulkan sikap peduli untuk saling membantu kepada sesamanya. Hal tersebut tidak terlepas dari sifat gotong royong rakyat Indonesia yang sudah menjadi tradisi sejak dulu, sehingga mampu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Energi yang luar biasa tersebut telah dimanfaatkan dengan baik oleh tokoh masyarakat saat itu untuk berjuang mengusir penjajah dari tanah air kita. Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini merupakan buah dari solidaritas, rasa kebersamaan dan cinta tanah air dari rakyat Indonesia.

Rasa sosial lainnya bisa kita lihat dari beberapa tradisi yang ada di beberapa suku di tanah

air. Misalnya tradisi gotong royong dalam menanam padi masyarakat Sambas (Melayu Sambas/Urang Sambas) di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat yang dikenal dengan istilah *belale'*.

Tradisi sejenis juga berlaku di Kalimantan Barat, seperti tradisi "*Marsialapar*" yang dilakukan oleh masyarakat Mandailing, Sumatera Utara. Masyarakat secara sukarela akan membantu warganya yang akan membuka lahan kebun maupun menanam padi di sawah.

Sementara itu, masyarakat Aceh (Melayu Aceh) juga memiliki tradisi yang mirip dan dikenal dengan istilah "*Meusaraya*" atau "*Meuramee Meuneugoe*". Tradisi gotong royong ini dilakukan secara timbal balik tanpa pamrih. Tentu tradisi semacam ini juga ada diberbagai belahan wilayah Indonesia lainnya.

Kita juga bisa melihat tradisi gotong royong lainnya, seperti tradisi menarik jala ikan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang ada di pesisir pantai. Biasanya masyarakat yang ada di pinggir pantai secara spontan akan membantu para nelayan yang sedang menarik jala ikan dari tengah laut. Sebagai upahnya, para nelayan akan memberikan sejumlah ikan kepada masyarakat yang telah menolong mereka tersebut secara suka rela.

Setiap daerah memiliki istilahnya sendiri dalam hal tradisi menarik jala ikan tersebut. Kalau di Aceh, biasanya disebut "*Tarek Pukat*". Sementara itu di Pacitan, Jawa Timur disebut "*Eretan*". Mungkin daerah lainnya di Indonesia memiliki nama yang sama atau justru berbeda. Tentu masih banyak ragam budaya gotong royong lainnya seperti saat

kenduri untuk acara perkawinan dan sunatan, acara pindah rumah dan lain sebagainya. Semua itu sama-sama mencerminkan bahwa budaya gotong royong sebenarnya ada dan hidup dalam tradisi masyarakat Indonesia. Sayangnya, khusus untuk wilayah perkotaan terutama di kota-kota besar di Indonesia, tradisi gotong royong tersebut sudah mulai pudar tergerus oleh kemajuan zaman. Para pemuda banyak yang kurang peduli terhadap tradisi leluhurnya.

Bahkan, mereka lebih memilih tradisi asing yang sebenarnya tidak cocok dengan kebudayaan kita. Ini semua tidak terlepas dari derasnya informasi yang masuk melalui internet sebagai akibat kemajuan teknologi dibidang komunikasi dan informasi.

Kehidupan zaman sekarang yang serba cepat dan instan membuat manusia seakan-akan disibukkan dengan berbagai aktivitas duniawi yang tiada henti. Setiap hari orang berangkat pagi dari rumahnya dan kembali lagi di malam hari. Mereka berangkat ketika matahari belum muncul dan kembali saat matahari sudah tenggelam.

Kehidupan di luar rumah berjalan cepat dengan kesibukan yang luar biasa. Ribuan kendaraan tumpah di jalan raya. Semua orang bergerak mengejar mimpinya sendiri-sendiri.

Banyak kendaraan yang melaju kencang, saling mendahului, dan saling tidak peduli, karena hanya mementingkan diri mereka sendiri.

Tidak aneh kalau kita sering mendengar bunyi klakson yang menyala keras karena merasa kesal dengan pengemudi lainnya yang menyalip seenaknya, sehingga hampir mencelakan dirinya. Atau ada pengemudi yang tidak memberi kesempatan sedikitpun kepada pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan, meskipun sudah melambai-lambaikan tangannya meminta agar para pengendara memperlambat laju kendaraannya.

Kita juga sering melihat para pengemis dan gelandangan berkeliaran di jalanan atau di perempatan lalu lintas. Bukan saja mengganggu pemandangan dan ketertiban lalu lintas, tetapi juga bisa membahayakan orang lain dan mereka sendiri.

Seharusnya kalau masyarakat dan negara memang peduli, mereka tidak harus berada di jalan. Mereka harus dipelihara oleh negara. Bukankah sudah ada kementerian sosial di negeri ini? Bukankah setiap agama mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada sesamanya? Lantas mengapa kita tidak mengaplikasikannya? Kemana larinya hati nurani? Kemana rasa sosial kita yang ada selama ini? Tidakkah masih tersisa warisan budaya leluhur itu yang masih bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari?

Kita masih belum terlambat untuk berbuat kebaikan dan menolong siapa saja makhluk Tuhan

yang membutuhkannya. Kebaikan harus ditebar secara universal kepada setiap makhluk hidup yang ada dimuka bumi ini. Kehidupan akan terasa indah kalau kita sama-sama peduli dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Berbuat baik dan peduli itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja ketika ada orang lain yang membutuhkannya.

Misalnya saat dijalan ketika arus lalu lintas macet karena lampu lalu lintas tidak menyala dan kebetulan sedang tidak ada petugas di sana. Kita bisa mengambil alih peran petugas dengan turun dari kendaraan dan menjadi sukarelawan untuk membantu menguraikan kemacetan. Bukan saja orang lain terbantu, tetapi kita juga sudah memberikan teladan yang baik bagi pengguna jalan lainnya.

Saat ada kejahatan terjadi di depan mata, sebaiknya kita berusaha untuk ikut mencegahnya.

Jangan hanya diam dan menjadi penonton.

Contohnya video yang muncul secara viral baru-baru ini yang memperlihatkan

terjadinya kasi kejahatan di depan sebuah pom bensin yang ditonton banyak orang. Semua orang yang ada di sekitar tempat kejadian hanya bisa menyaksikan kejahatan tersebut terjadi di depan mata mereka.

Ironisnya, tak ada seorang pun yang berusaha menghentikannya. Pantasnya ada yang mengambil inisiatif dan peduli dengan berusaha mencegah aksi kejahatan tersebut. Dalam lingkungan terdekat kita bisa melakukan pekerjaan sosial lainnya seperti menjaga keamanan dalam

program Siskamling yang diadakan oleh RW setempat.

Jangan karena kita merasa mampu dan punya uang, lantas tidak mau ikut berjaga bersama warga dan memilih diam di rumah. Padahal kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, pasti masyarakat di sekitar kitalah yang duluan membantu, bukan saudara kita yang jauh.

Juga dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan, seperti saluran pembuangan. Jika kita sama-sama peduli dan bergoyong royong, maka semuanya menjadi mudah. Sesama warga jadi semakin akrab dan hubungan sosial terjaga dengan baik. Akibatnya kita jadi tahu kalau ada warga yang sedang mengalami kesusahan, misalnya sedang sakit atau terkena musibah lainnya, sehingga bisa membantu mereka keluar dari kesulitannya.

Berkenaan dengan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSNS) yang diperingati setiap tanggal 20 Desember, mari peduli terhadap orang lain dan selalu menjaga rasa kesetiakawanan sosial, serta menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan.

**Selamat Hari Kesetiakawanan Sosial \*\*\*\***





# KETAHANAN PANGAN ADALAH KETAHANAN NASIONAL

Oleh: Indra Suryaman

**P**ada Kamis (9/11/2017) di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memperingatkan potensi *proxy war* yang mengancam ketahanan nasional Indonesia. Salah satunya adalah dengan ancaman bioterorisme yang berasal dari upaya penyebaran virus-virus. Ancaman tersebut, kata Gatot, dilakukan semata untuk merebut sumber daya alam Indonesia. Bioterorisme ini salah satu merupakan cara berperang dengan negara lain tanpa angkat senjata.

Gatot menjelaskan fenomena tersebut nyata ancamannya lantaran melihat kondisi bumi saat ini. Jumlah penduduk saat ini tercatat 7.5 miliar jiwa, itu dua kali lipat jumlah ideal bumi bisa ditinggali. Berdasarkan data *British Petroleum*, angka itu konsisten meningkat dan pada tahun 2043, diperkirakan cadangan minyak akan habis dengan total penduduk mencapai 12.1 miliar.

Hal ini berakibat negara di sekitar ekuator seperti Indonesia terancam menjadi target lantaran memiliki cadangan pangan dan energi yang besar. Konsumsinya energinya 14.1 persen maka tahun 2043 akan habis dan jumlah penduduk 12.1 miliar. Bayangkan dan tempat yang masih aman kondisi cadangan minyak ada energi ada makanan

ada di sekitar ekuator atau khatulistiwa karena bisa bercocok tanam sepanjang tahun antara lain Indonesia.

Apa yang disampaikan oleh Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tersebut bisa jadi merupakan pemikiran mendalam yang menterjemahkan antara realita jaman dengan perkembangan global yang telah berjalan, jaman boleh saja makin modern dan perkembangan teknologi terus meningkat, bahkan sekat antar bangsa seolah makin tak ada. akan tetapi setinggi-tingginya perkembangan itu pada akhirnya ada kebutuhan mendasar dari sebuah bangsa yaitu menghidupi rakyatnya dengan pangan yang tentu saja terjamin keberadaannya sepanjang tahun dan terus menerus.

Jika bangsa Indonesia mau belajar dari masa lalu dimana bangsa-bangsa Eropa datang dan kemudian menguasai wilayah nusantara hanya demi mengambil kekayaan rempah, bukan tidak mungkin suatu hari nanti akan ada kekuatan-kekuatan di luar Indonesia yang ingin menguasai atau "menjajah", hanya demi mengambil apa yang dihasilkan oleh "tanah surga" kita.

Maka, dengan adanya kesadaran yang besar tentang ketahanan pangan akan menjadi ketahanan nasional, penting untuk dikedepankan dalam pola pikir bangsa ini agar kesadaran itu

Akan juga memberi efek pada bidang-bidang lain yang tengah berkarya dan menjalankan rutinitasnya untuk mengedepankan hal ini.

*Gemah ripah loh jinawi*, ungkapan kata yang sering disematkan pada Indonesia, yang memiliki arti kekayaan alam yang berlimpah. Sebagai negara agraris, Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ditambah posisi Indonesia yang dinilai amat strategis, mulai dari sisi geografis, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat.

Selain itu dari sisi geologi, Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral. Daerah perairan di Indonesia kaya sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman, ikan dan hewan laut, dan juga mengandung berbagai jenis sumber mineral.

Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Pada Februari 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 31,74 persen angkatan kerja di Indonesia atau 38,29 juta bekerja di sektor pertanian. Dengan angka tersebut, telah terjadi hampir dua juta pekerja sektor pertanian beralih ke sektor lain hanya dalam setahun.

Sebagai agraris, pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan komoditas ekspor, antara lain padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, aneka cabai, ubi, dan singkong. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan hasil perkebunannya, antara lain karet, kelapa sawit, tembakau, kapas, kopi, dan tebu.

Sejarah mencatat Indonesia pernah mengalami masa swasembada pangan, khususnya komoditas beras, pada dekade 1980-an. Namun di sisi lain, Indonesia kerap mengimpor bahan pangan dari negara-negara lain.

Pertanian sendiri memiliki pengertian yang luas, pertanian tidak hanya seperti yang kita kenal dengan mencangkul lahan untuk menanam

berbagai jenis padi-padian, buah, sayur, kapas dan lain sebagainya. Perikanan, peternakan, kehutanan, dan beberapa bidang lain menjadi satu pada pertanian dalam arti luas.

Harus diakui, pertanian kita masih



Foto: internet

didominasi petani 'gurem' yang bekerja secara tradisional. Perlu menambah pengetahuan mereka, selain pengadaan teknologi untuk tanam dan panen.

Berarti pula mengubah paradigma dalam membangun sektor pertanian, dari selama ini tradisional menjadi modern berbasis agroindustri. Dengan mengembangkan agroindustri, selain memberi nilai tambah terhadap produksi, juga merangsang generasi muda untuk mau turun ke sawah atau lahan pertanian.

Ada satu kutipan isi pidato Presiden RI Joko Widodo pada pembukaan Konferensi Asia Afrika 22 April 2015 lalu; "Sinar matahari yang terus menerus akan membuat produksi pangan, termasuk energi dan air, akan tetap melimpah. Dan kita hidup di wilayah ini." Kalimat itu hendaknya jadi bahan perenungan bahwa masih ada kesempatan bagi kita

untuk merubah arah berpikir dan arah pergerakan bangsa ini agar mulai melihat bahwa ketahanan pangan bisa menyelamatkan bangsa ini.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia setelah udara dan air. Karena berkaitan dengan persoalan kelangsungan hidup maka tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memikirkan masalah ketahanan pangan (*food security*). Ia tidak hanya sekedar persoalan makanan seperti ketersediaan, keterjangkauan, kestabilan dan penggunaan yang aman, tetapi ia juga dipercaya sebagai faktor yang turut mempengaruhi ketahanan nasional (*national security*)

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman



Foto: internet

pada 2015 pernah menyampaikan, “tidak mungkin ketahanan nasional bisa tercapai tanpa ketahanan pangan dan tidak mungkin pula ketahanan pangan terwujud tanpa swasembada pangan. Atas dasar pemikiran itu, Menteri Kabinet Kerja ini telah sepakat untuk bekerjasama dengan TNI dalam rangka mendukung upaya khusus untuk swasembada pangan 2017”.

Walau muncul kesan seakan-akan Indonesia sedang dalam “darurat pangan”, karena TNI biasanya sering mendapat tugas tambahan dalam menghadapi keadaan tanggap darurat seperti mengatasi bencana alam atau hal-hal insidental berkaitan keselamatan masyarakat, usaha TNI dalam memberi kontribusi aktifnya di sektor pertanian patut diberi apresiasi.

Seyogyanyalah seluruh elemen bangsa bahu membahu untuk mewujudkan cita-cita mulia ini yaitu Indonesia yang berkedaulatan khususnya di sektor pangan. Apalagi negara kita merupakan negara agraris, sudah sepatutnya jika seluruh masyarakatnya terlibat dalam kegiatan pertanian.

Penglibatan TNI dalam program ketahanan pangan Jokowi ini diyakini mirip dengan strategi era Orde Baru yang ala militer. Kala itu produksi pertanian meningkat tajam. Indonesia berhasil

merubah diri dari negara importir menjadi eksportir pangan. Kita swasembada pangan pada tahun 1980 dan berhasil mengantongi medali “from rice importer to self sufficiency” dari organisasi pangan dunia (FAO).

Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Diharapkan kemandirian pangan yang menjadi upaya pemerintah dapat terwujud dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.

Oleh sebab itu kita seluruh rakyat Indonesia harus tetap mendukung segala upaya Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan sehingga ketahanan nasional dapat terwujud.

Sangat perlunya kita mengingat sejarah bangsa ini dan bangsa-bangsa dibunia, sebagai negara yang kaya akan potensi alam dan pangan kita wajib menjaga dan terus siap dalam mengelola dan mengembangkannya, seperti diawal pembahasan ini dimana Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan tentang “Proxy War.”

Boleh saja sebagian kalangan tidak setuju



Sorghum salah satu produk pertanian yang sedang gencar dikembangkan oleh pemerintah demi menjaga ketahanan pangan

dengan istilah tersebut akan tetapi kenyataannya jika kita jernih melihat bahwa sesungguhnya hampir semua negara-negara diseluruh dunia berlomba-lomba menjadi negara yang kuat dalam dunia teknologi informasi, industri manufaktur, investasi dan perbankan serta industri hiburan. mungkin akan lebih baik jika menjadi negara industri pangan mulai dari hulu sampai hilir sehingga selain kita telah menjamin masa depan bangsa ini, kita juga menjadi negara yang sangat diperhitungkan, yang harus tetap ingat bahwa **Ketahanan Pangan adalah Ketahanan Nasional Kita.** \*\*\*\*

# BELA NEGARA DARI SIAPA DAN UNTUK APA ?



Oleh: Muhammad Iqbal



sesungguhnya.

Barangkali pembahasannya menjadi kurang lengkap, apabila definisi dan substansi “Bela Negara” tidak diungkapkan secara tegas, termasuk urgensinya yaitu dari siapa dan untuk apa Bela Negara itu sesungguhnya? Bagaimana yang efektif mensosialisasikannya? Untuk itu, artikel singkat ini mencoba membahas Bela Negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## DEFINISI, SUBSTANSI, DAN URGENSI BELA NEGARA

Bela Negara dapat didefinisikan sebagai suatu konsep yang disusun oleh perangkat regulasi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, Bela Negara merupakan

sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara seutuhnya.

Menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berikutnya, berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ditekankan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Artinya, ada “hak” sekaligus “kewajiban” dalam substansi Bela Negara.

Bela Negara tidak hanya ranahnya Indonesia semata, tetapi juga diterapkan di beberapa negara lainnya dan dengan terminologi, substansi, dan sistem menurut masing-masing negara.

Di Indonesia, spektrum Bela Negara tersebut sangat luas di berbagai bidang kehidupan yaitu mulai

**B**elakangan, paling tidak dalam satu dekade ini, ungkapan Bela Negara jadi mengemuka dan banyak didiskusikan, baik pada beberapa pertemuan formal maupun dalam pengejawantahannya di lapangan. Terhitung sejak tahun 2014, pemerintah telah mencanangkan “Gerakan Bela Negara” yang diikuti dengan penetapan “Hari Bela Negara” tanggal 19 Desember berdasarkan Keppres Nomor 28 Tahun 2006. Tanggal tersebut dipilih berdasarkan acuan terhadap deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 19 Desember 1948.

Secara mendasar UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa: “Semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (pasal 27, ayat 3)” dan berikutnya: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 Ayat 1)”. Kendati demikian, hingga saat ini relatif masih terdapat kesimpangsiuran persepsi mengenai substansi Bela Negara itu sendiri. Bahkan sebagian kalangan ada yang beranggapan dan mengaitkannya dengan wajib militer.

Padahal sebetulnya bukan itu makna yang

dari yang sifatnya lunak (*soft*) hingga bersifat keras (*hard*). Spektrum yang sifatnya lunak meliputi fisik (misalnya: mempertahankan kedaulatan negara) dan nonfisik (contoh: kesadaran Bela Negara).

Sementara itu, spektrum yang bersifat keras lebih terkait pada ancaman militer. Bela Negara spektrum lunak merupakan pondasi dasar terbentuknya kuantitas dan kualitas Bela Negara dengan spektrum keras. Satu hal yang cukup penting dan strategis adalah urgensi “Kesadaran Bela Negara”, karena dengan kesadaran suatu tindakan dapat dilakukan secara sadar pula.

Hakikatnya adalah kesanggupan dalam berbakti pada negara dan kesediaan untuk berkorban demi membela negara. Di dalamnya terkandung 5 (lima) unsur dengan contoh nilai penjabaran dan

Bela Negara dapat dijawab dengan tegas, yaitu “dari setiap warga negara”.

Dalam salah satu pidatonya pada peringatan Hari Bela Negara tanggal 19 Desember 2014, Presiden RI Joko Widodo menekankan bahwa “Konstitusi mengamanatkan kepada tiap-tiap warga negara dengan hak dan kewajibannya untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Substansinya adalah “Bela Negara.”

Walaupun pidato tersebut sudah disampaikan sekitar tiga tahun yang lalu, namun fundamental substansinya serta aktualitas urgensinya tidak lupuk dimakan waktu, khususnya terkait dengan era kekinian.

Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa “Semua anak bangsa harus tergerak dan bergerak



**Kemampuan awal Bela Negara: meliputi kedisiplinan, keuletan, mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, serta pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional dan aspek fisik/jasmani (memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal Bela Negara yang bersifat psikis).**

Gambar oleh : Google

indikatornya masing-masing sebagai berikut:

1. **Cinta tanah air:** mengenal dan mencintai tanah air (menjaga ruang wilayah negara dan bangga sebagai bangsa Indonesia);
2. **Kesadaran berbangsa dan bernegara:** sadar sebagai warga negara Indonesia (keragaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat);
3. **Meyakini Pancasila sebagai ideologi negara:** sadar sebagai warga negara Indonesia (keragaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat); dan
4. **Rela berkorban untuk bangsa dan negara:** rela berkorban untuk bangsa dan negara (siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman).

## BELA NEGARA... DARISIAPA?

Sebelumnya telah disinggung bahwa substansi Bela Negara mengandung “hak” sekaligus “kewajiban”. Oleh karena itu, pertanyaan dari siapa

untuk Bela Negara sesuai dengan ladang pengabdian masing-masing. Panggilan untuk Bela Negara dapat dilakukan oleh guru, bidan, tenaga kesehatan, petani, buruh, profesional, pegawai negeri sipil, pedagang dan profesi lainnya.”

Presiden melanjutkan bahwa “Bela negara bisa dilakukan melalui pengabdian profesi di berbagai bidang kehidupan masing-masing. Seorang petani bekerja keras meningkatkan produksi adalah upaya Bela Negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Mewujudkan kedaulatan pangan. Seorang guru berjuang mendidik anak-anak di kawasan perbatasan adalah wujud nyata Bela Negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Para prajurit TNI menjaga pulau-pulau terdepan, melakukan tugasnya karena semangat Bela Negara, mempertahankan kedaulatan wilayah negara kita. Para dokter, bidan, dan tenaga kesehatan memenuhi panggilan Bela Negara, dengan penuh semangat memberi pelayanan kesehatan sampai ke wilayah-wilayah terpencil. Begitu pula dengan perang terhadap



Deputi Bid. Polstra Irjen Pol. Drs. Tjetjep Agus S, MM, MH (kiri) dan Sahl Bid. Hankam Mayjen TNI Toto Siswanto, S.IP, MM (kanan)

*Kejahatan narkoba adalah tindakan nyata untuk menyelamatkan generasi muda penerus masa depan bangsa. Apa yang dilakukan oleh para guru, petani, dokter, prajurit TNI, dan profesi lainnya adalah wujud nyata kecintaan kepada Tanah Air. Tugas kita semua memastikan agar api semangat Bela Negara terus menyala, dan bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang."*

Secara filosofis, konsepsi Bela Negara adalah dalam rangka menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Setiap warga negara harus memahami bahwa prinsip Bela Negara seyogianya menyesuaikan dengan dinamika perubahan dan perkembangan zaman serta tantangan kehidupan. Masa lalu adalah sejarah, masa sekarang sebagai realita dan masa depan berupa tantangan yang harus disiapkan dengan rencana matang serta diisi dengan aktivitas bermanfaat.

### UNTUK APA BELA NEGARA?

Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelago country*) yang terletak pada posisi strategis di lintasan ekuator (zamrud khatulistiwa) di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Hindia Pasifik) dengan potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kekuatan/posisi tawar (*bargaining*

*power/position*) yang strategis dalam pencatatan dan hubungan antar bangsa, baik dalam lingkup kawasan maupun dalam tataran global.

Namun, Indonesia harus mengamankan kepentingan nasional dengan menggunakan segenap instrumen kekuatan yang ada berdasarkan kesadaran ruang (*space consciousness*) dan kesadaran geografis (*geographical awareness*) yang berakar pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya. Implementasinya diselenggarakan dengan mengutamakan pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) secara serasi, selaras, dan seimbang. Dengan demikian, pertanyaan tentang untuk siapa Bela Negara dapat dijawab secara lugas yaitu "untuk NKRI".

Bela Negara bukan bersifat *utopia* dan tentu saja tidak lahir dalam ruang kosong, namun berakar dari sejarah perjuangan bangsa. Tantangan dalam sejarah adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup bernegara dan berbangsa yang berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam hal kebudayaan. Di sinilah letak pentingnya untuk apa Bela Negara perlu diwujudkan dan diimplementasikan oleh segenap komponen bangsa.

Indonesia tidak hanya mengalami berbagai tantangan yang harus dihadapi saat ini tetapi juga harus diantisipasi untuk masa depan.

Akhir-akhir ini kemajuan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi berlangsung secara cepat sehingga sedikit banyaknya berpengaruh terhadap pola pikir, pola sikap dan pola tindak masyarakat serta berpotensi mempengaruhi perkembangan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Terjadi fenomena yang bersifat multidimensi, diantaranya dimensi tanpa batas (*borderless*), dimensi saling ketergantungan (*interdependency*), dan dimensi saling terhubung (*interconnected*) dalam bingkai globalisasi.

Menilik sifat dan kompleksitas dampak yang ditimbulkannya, maka negara tidak lagi menjadi satu-satunya elemen yang bertanggung jawab untuk menghadapinya. Partisipasi dan peran aktif setiap individu warga negara dalam bentuk Bela Negara akan menentukan keberhasilan suatu bangsa dalam mengantisipasi dampak negatif yang mengancam eksistensi negara.

Selain tantangan dalam aspek teknologi, Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan isu global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi, terorisme, radikalisme, penyalahgunaan narkoba, perdagangan manusia (*human trafficking*), tindak pidana transnasional yang terorganisasi (*transnational organized crime*), kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dan sebagainya.

Tidak kalah dahsyatnya, dunia kini juga tengah dihadapkan pada situasi dan kondisi yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa keterlibatan langsung pihak yang berkepentingan, atau dikenal dengan istilah "*proxy war*".

Hal tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan besar untuk mengelakkan konfrontasi secara langsung dan menghindari terjadinya perang terbuka yang dapat membawa konsekuensi tanggung jawab yang besar pula. Kedepan, skala ancaman perang dunia maya (*cyberwarfare*) dan perang yang lebih kompleks

(*hybrid warfare*) yang memadukan antara perang konvensional dengan perang tidak teratur diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya intensitas penggunaan teknologi komputerisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Di lingkup internal (nasional), Indonesia juga masih mengalami fenomena kemiskinan, keterbelakangan, ketimpangan, keterisolasian, serta keterbatasan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang eskalasinya dapat mengancam eksistensi bangsa dan negara.

Disamping itu, penjagaan dan pengelolaan kemajemukan juga semakin bertambah kompleks. Untuk itulah, sekali lagi, Bela Negara perlu diwujudkan guna menyikapi dan mengantisipasi serta mencari solusi terbaik dalam rangka menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang sedang dan bakal muncul dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Realita dan fakta aktual menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman dan penghayatan terhadap Empat Konsensus Dasar Bangsa masih rendah; (2) Rasa memiliki terhadap bangsa dan negara masih lemah; (3) Pembelaan terhadap negara belum optimal; dan (4) Kondisi Ketahanan Nasional secara umum dalam lima tahun terakhir dinilai kurang tangguh (Labkurtanas Lemhannas, November 2016). Oleh karena itu, salah satu langkah yang perlu disiapkan yaitu sosialisasi mengenai Pembinaan Bela Negara.

## SOSIALISASI PEMBINAAN BELA NEGARA

Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan yang secara sosiologis dikenal sebagai teori peran (*role theory*) karena di dalamnya diajarkan peran-peran yang harus dijalankan. Salah satu metodenya adalah melalui pelatihan yang dilengkapi modul berikut:

- Modul 1: **Konsensus Dasar Bela Berbangsa dan Bernegara** (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan



Deputi Bid. Sisnas  
Mayjen TNI Aris Martono Haryadi (kiri) dan  
Deputi Bid. Jiandra Laksda TNI  
Teguh Prihantono, S.Sos (kanan)

- Bhinneka Tunggal Ika);
- Modul 2: **Konsep Kebangsaan** (Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Kewaspadaan Nasional, dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif);
- Modul 3: **Integritas Moral, Etika, dan Supremasi Hukum** (Disiplin Nasional, Kepemimpinan (*leadership*), Sistem Politik, dan Sistem Hukum);
- Modul 4: **Kearifan Lokal** (Kearifan dan Keunggulan Lokal, Keunggulan Komparatif dan Kompetitif, Keunggulan dalam Sejarah Perjuangan dan Faktor yang Mempengaruhi); dan
- Modul 5: **Nilai-nilai Dasar Bela Negara** (urgensi, strategi, dan aktualisasi dalam membangun nilai-nilai dasar Bela Negara).

Implementasi modul pelatihan dapat dilakukan dengan Pelatihan Wisesa Pembinaan Bela Negara (Binbelneg). Wisesa (*high authority*) merupakan Pembina Bela Negara atau Ahli Bela Negara (utama, madya, muda dan pratama) yang mencapai taraf pengendalian diri dan kemampuannya sehingga layak menjadi teladan bagi segenap kader-kader Bela Negara.

Mekanismenya melalui 3 (tiga) metode. Pertama, Pelatihan Wisesa I (Utama) diperuntukan kepada 1) pimpinan unit utama K/L dan Non-K/L; 2) pimpinan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 3) pimpinan tingkat nasional ormas/politik/nonpemerintah yang terseleksi; dan berikutnya (4) penyelenggaraan Pelatihan Wisesa di berbagai tingkat dari nasional hingga daerah untuk menyiapkan Wisesa Madya, Muda, dan Pratama.

Kedua, Pelatihan Wisesa II dengan metode sebagai berikut 1) *andragogy* (pembelajaran orang dewasa); 2) model pembelajaran baru dengan menggabungkan tiga aspek utama yaitu teknologi, strategi mengajar (*pedagogic*), dan konten/materi pengetahuan konkret (*ontology*) atau dikenal dengan sebutan *Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)* melalui kombinasi pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran berbasis komputer (*online learning*) atau dikenal dengan istilah *blended learning*; 3) koherensi kegiatan mendidik, mengajar, dan/atau melatih (dikjartih); 4) metode atau skenario; 5) terstruktur/mandiri; dan 6) individual atau kelompok. Ketiga, Pelatihan Wisesa III terkait dengan penyiapan perangkat lunak dan instrumen evaluasi.

Akhirnya dengan mencoba menyelami definisi, substansi, dan urgensi Bela Negara, berikut pertanyaan tentang dari siapa Bela Negara serta untuk apa Bela Negara, apalagi setelah melalui sosialisasi tentang Bela Negara, maka segenap komponen bangsa Indonesia berhak dan sekaligus berkewajiban dalam mewujudkan seraya

mempraktikkannya guna menjaga eksistensi, kedaulatan, serta persatuan dan kesatuan NKRI dalam kehidupan sehari-hari.

Prinsip kehadiran negara di tengah-tengah masyarakatnya saja tidak cukup tanpa kehadiran masyarakat dalam negaranya. Filosofi mendasar dalam aspek Bela Negara seharusnya memiliki karakteristik ke-Indonesia-an sebagaimana pernah diamanatkan oleh Bung Karno yaitu berdasarkan sejarah lahirnya negara, bangsa dan tanah air, serta cita-cita dan ideologi bangsa.

Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Terbatas tanggal 19 Desember 2016 lalu, Sidang Kabinet Paripurna tanggal 4 Januari 2017 dan Rapat Terbatas tanggal 18 Januari 2017 serta amanah yang tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-87/Seskab/Polhukam/02/2017 tanggal 3 Februari 2017 ditujukan kepada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) yang isinya "*bahwa masalah Bela Negara agar diberikan dan diperkuat penanganannya kepada Setjen Wantannas dengan tidak membentuk organisasi baru.*"

Adanya arahan dan amanat tersebut merupakan tantangan yang harus direspon secara positif dan profesional serta proporsional. Ruang lingkupnya adalah menjaga fungsi koordinasi, internalisasi, sinkronisasi, harmonisasi, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pengembangan Binbelneg seraya menyiapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pembinaan Bela Negara (Binbelneg) berikut modul utama sebagai pedoman K/L dalam melaksanakan Binbelneg sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Implementasinya, modul induk Binbelneg disiapkan oleh Setjen Wantannas, sementara modul khusus dibuat masing-masing K/L dengan mengadu kepada modul induk Setjen Wantannas. Di samping itu juga akan dilaksanakan *Training of Trainer (ToT)* dan menyiapkan Sistem Informasi Binbelneg yang terintegrasi secara nasional.

Semua gambaran tersebut di atas ditujukan agar Binbelneg dapat berjalan secara mangkus dan sangkil (*efficient and effective*). Untuk itu, perlu adanya rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan (*roadmap*) terkait dengan target dan capaian pelaksanaan Bela Negara.

Selain itu, juga diperlukan kedudukan hukum (*legal standing*) terkait dengan Bela Negara yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi serta dikemas sedemikian rupa dengan substansi kekinian yang dapat menarik perhatian semua pihak.

Semoga.....\*\*\*\*



## **PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**

Oleh: Desi

**D**engan pertimbangan bahwa bidang keamanan siber merupakan salah satu bidang pemerintahan yang perlu didorong dan diperkuat sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional, pemerintah memandang perlu dibentuk badan dengan menata Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara, guna menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Dalam Perpres itu disebutkan, bahwa Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.

"BSSN dipimpin oleh Kepala," bunyi Pasal 1 ayat (3) Perpres tersebut. Menurut Perpres ini, BSS mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan,

mengembangkan, dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BSSN menyelenggarakan fungsi: penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian protek e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan, kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

Selain itu, juga pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan; pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN; pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN; pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan pelaksana kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.

Kehadiran BSSN sangat dibutuhkan guna menanggulangi serangan pencuri data maupun informasi penting negara. Dengan informasi penting itu, pihak berkepentingan bisa menggunakan data untuk mengontrol Indonesia.

Serangan siber sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Namun era Jokowi masih kuat, sehingga kehadiran kejahatan siber masih belum dirasakan. Tidak hanya itu, hampir 58 persen pengguna internet di Indonesia tidak merasa mendapatkan serangan sehingga hal ini tidak terlalu dipentingkan

Negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Australia, dan Thailand, sudah memiliki badan siber negara. Selain sebagai penanggulangan serangan siber, badan siber difungsikan untuk membuat regulasi pengadaan infrastruktur jaringan internet.

1945. Hal tersebut adalah aturan dasar yang tidak bisa dilanggar oleh peraturan perundang-undangan dibawahnya. Dia menegaskan, UU ITE juga telah memberikan koridor yang jelas, mengatur hak dan kewajiban dalam pemanfaatan siber secara bebas dan bertanggung jawab, jadi tidak perlu ada kekhawatiran terkait hal tersebut.

BSSN akan mengacu pada IDPRR (*Identify, Detect, Protect, Response and Recover*) yang telah banyak diterapkan oleh negara maju sebagai langkah preventif serangan siber.

Dengan dibentuknya BSSN maka Indonesia bisa melihat bagaimana mitigasi negara-



Foto: internet

Badan siber negara diperlukan Indonesia, sebab jika nanti semua instansi pemerintah di pusat dan daerah terhubung, maka penjahat siber akan mencari titik lemah jaringan yang dipergunakan sebagai pintu masuk.

melalui BSSN pemerintah bisa segera membuat perencanaan yang matang untuk membangun sistem keamanan siber. Badan ini perlu membuat roadmap yang jelas dan terukur untuk pengembangan SDM Siber yang tangguh dan membangun kemampuan teknologi siber yang mumpuni secara mandiri sehingga tidak ada ketergantungan dengan produk asing di masa depan

Terkait dengan adanya kekhawatiran bahwa BSSN dalam pengawasan siber berpotensi melanggar hak-hak warga, sesungguhnya hak-hak warga negara sangat jelas dijamin di dalam UUD

negara yang sudah memiliki badan siber. Karena itu, keberadaan Badan Siber Nasional harus sangat penting, karena peristiwa serangan siber yang masif semakin sering terjadi dewasa ini.

Salah satunya serangan siber *malware ransomware wannacry*. serangan teror siber ini seharusnya bisa membuka mata pemerintah dan masyarakat Indonesia betapa rentannya keamanan di wilayah siber. Tidak hanya rumah sakit, perusahaan dan institusi pemerintah juga banyak yang terkena malware ganas ini.

Mendukung kerja BSSN adalah langkah yang bijak, karena keberadaan badan ini sesungguhnya merupakan refleksi dan antisipasi dari perkembangan dunia yang semakin global dan negara ini harus siap melindungi diri dari hal-hal negatif yang mungkin timbul.\*\*\*\* (Sumber: Kompas.com)



## SETJEN WANTANNAS RAIH PERINGKAT KE-VI PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017

Oleh: Desi

**S**ekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) diwakili oleh Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Brigjen TNI Isaac Marcus P, meraih peringkat ke-VI untuk kategori Lembaga Non Struktural dalam Pemingkatan Keterbukaan Informasi oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI). Pemingkatan tersebut hanya diberikan kepada 10 Badan Publik dari setiap kategori yang berasal dari Kementerian,

Lembaga, BUMN dan Perguruan Tinggi.

Penganugerahan pemingkatan ini disampaikan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, pada Kamis (21/12/2017). Turut hadir pada acara tersebut diantaranya Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara dan Ketua Komisi Informasi Pusat Tulus Subardjono.

Dalam sambutannya, Wapres Jusuf Kalla mengatakan, pemingkatan bagi Kementerian atau Lembaga yang masuk 10 besar peringkat Keterbukaan Informasi ini

Karena adanya keterbukaan dalam memberikan informasi yang akurat, tepat, dan berguna bagi masyarakat.

Dengan demikian, Kementerian maupun Lembaga tersebut dianggap sudah berperan besar meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sebuah prestasi yang patut dibanggakan, dimana pada 2016 Setjen Wantannas tidak masuk dalam 10 besar. Peringkat Keterbukaan Informasi yang diraih ini juga membuktikan kinerja Setjen Wantannas yang juga berhasil melakukan perubahan di segala hal

Perlu diketahui, Komisi Informasi Pusat RI melakukan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi berdasarkan tiga variabel penilaian yaitu *Self Assessment Questinnaire* (SAQ), *Visitasi Lanjutan Acak* (VLA) dan *Visitasi*. Setelah melalui tahapan pertama lolos SAQ. Kemudian masuk tahapan *Visitasi Lanjutan Acak* (VLA) dengan menghasilkan berbagai variabel penilaian.

Selanjutnya, dari sepuluh K/L yang lolos tahapan VLA dilakukan tahapan *visitasi*. Tahapan *visitasi* di lingkungan Setjen Wantannas telah dilaksanakan pada Kamis (30/11/2017). Adapun Lembaga Non Struktural yang mendapat peringkat sepuluh besar sebagai berikut: Peringkat Pertama Komisi Pemilihan Umum (KPU); Peringkat Kedua Badan Pengusahaan Batam (BP Batam); Peringkat Ketiga Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK); Peringkat Keempat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu); Peringkat Kelima Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura; Peringkat Keenam Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas); Peringkat Ketujuh Ombudsman RI, Peringkat Kedelapan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Peringkat Kesembilan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas); dan Peringkat Kesepuluh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).\*\*\*\*



Oleh: Desi

**K**epala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal Brigjen TNI Isaac Marcus P dan Kepala Sub Bagian Hubungan Media dan Publikasi Setjen Wantannas Desi Fajar Nita, S.Sos menghadiri Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) yang bertempat di Ruang Serbaguna Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemen Kominfo) RI Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Berdasarkan catatan Setjen Wantannas, ada hal penting yang perlu dicermati yaitu di awal acara, Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Tulus Subardjono menyampaikan harapannya kepada DPR RI agar dapat memperjuangkan anggaran Komisi Informasi dalam menjalankan tugas melaksanakan keterbukaan informasi publik. Dijelaskan olehnya, bahwa paling tidak dana untuk pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik dan tata kelola informasi publik di Indonesia sekitar 0,2 persen dari APBN.

Diskusi yang mengusung tema "Potret Keterbukaan Informasi" ini menghadirkan sejumlah pembicara seperti Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Direktur Utama Kompas TV, Rikard Bagun dan Komisioner KIP Romanus Ndaud Lendong.

Dalam paparannya, Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono Laksono menanggapi permintaan kenaikan anggaran yang disampaikan oleh Ketua KI Pusat melalui koordinasi dengan Menteri Keuangan. Namun, biasanya, Menteri Keuangan selalu menyatakan tidak ada anggaran, sehingga perlu terobosan dengan cara menggeser anggaran dari K/L lain yang tidak terpakai untuk menambah anggaran KI. Perlu juga merevisi Undang-Undang KIP agar dapat memenuhi keinginan KI Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ingin anggarannya tercantum dalam APBN sebagaimana Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia.

Terakhir disampaikan juga, pentingnya keterbukaan informasi, karena ada yang mengatakan, siapa yang lebih dahulu mengetahui informasi, maka dialah yang akan jadi pemenangnya. Penyebaran informasi yang luas juga dapat berpengaruh pada persepsi masyarakat, bahkan dapat menentukan pilihan politik dan yang lebih



parahnya lagi mampu menjatuhkan pemerintah.

Sementara, Direktur Utama Kompas TV, Rikard Bagun mengatakan, perkembangan teknologi informasi dewasa ini membuat semuanya harus terbuka. Namun, untuk informasi yang bersifat rahasia, Rikard menyarankan agar dievaluasi kembali khususnya mengenai definisi informasi rahasia, sebab sudah tidak ada lagi yang bisa ditutupi oleh pemerintah pada era sekarang ini karena informasi itu dapat dengan mudah ditemukan di media sosial.

Pembicara lain, Komisioner KIP Romanus Ndaud Lendong mengatakan bahwa, kemiskinan, kasus korupsi dan pendidikan rendah di Indonesia akibat dari rezim yang tertutup.

"Rezim tertutupan memproduksi kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan, korupsi dan konflik sosial serta kebohongan. Selain itu, tertutupan merusak demokrasi dan membenih prasangka pada rezim penguasa," ujar Romanus.

Soal anggaran KI, Romanus menilai minimnya *good will* dari pemerintah daerah sehingga dukungan anggaran terbatas. Kondisi ini menyebabkan pelayanan informasi terkesan apa adanya, serta lemahnya daya tawar KI ke pimpinan daerah.

Acara yang digelar oleh KIP ini bertujuan untuk mempersiapkan penganugerahan pemingkatan Badan Publik di Istana Wakil Presiden pada esok harinya, Kamis (21/12/2017). Berdasarkan laporan Sekretaris KI Pusat Hendra Purnama, kegiatan ini dihadiri oleh 130 orang dari berbagai latar belakang profesi ataupun K/L Pemerintah.\*\*\*\*



## SETJEN WANTANNAS PERLU MAKSIMALKAN PERAN AGENT OF CHANGE

Oleh: Enang Suhendar

**S**enin (11/12/201) diselenggarakan *Exit Meeting* bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) RI mengenai hasil sementara evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas). Sebagai narasumber, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Pengetahuan dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I Kemen PAN dan RB, Ronald Andreas Anas, Ak.

*Progress* pelaksanaan RB di lingkungan Setjen Wantannas berdasarkan hasil *assessment*, menurut Ronald perlu ditingkatkan, salah satunya pada area Manajemen Perubahan. Walaupun *Road Map* telah disusun dan menunjuk *agent of change* di unit kerja, namun, perlu memaksimalkan peran *agent of change* sebagai penggerak perubahan di lingkungannya serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RB melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan secara *online*.

Pada bidang Peraturan Perundang-undangan, yang telah dilakukan oleh Setjen Wantannas adalah melakukan proses identifikasi dan pemetaan terhadap keselarasan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan organisasinya sendiri. Meski demikian, masih perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses pengendalian dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pada bidang Penataan dan Penguatan Organisasi, ternyata memerlukan kelanjutan proses penataan kelembagaan agar dapat sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku serta melakukan evaluasi mengenai efektivitas dan efisiensi organisasi dalam menghasilkan kinerja.

Rekomendasi untuk area ini adalah perlunya menetapkan peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi serta menjabarkannya ke dalam SOP Makro dan Mikro serta mengintegrasikan seluruh aplikasi yang telah ada saat ini.

Beralih ke Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Setjen Wantannas sudah melakukan *assessment*, namun belum secara keseluruhan. Kedepannya, diharapkan Setjen Wantannas dapat melakukan *assessment* terhadap seluruh pegawai, sehingga dapat dilakukan pemetaan terhadap sumber daya manusia dan terciptanya *Gap kompetensi* yang pada akhirnya dapat diterapkan sistem merit dalam pengisian jabatan.

Program yang terakhir adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Hingga saat ini, Setjen Wantannas sudah mematuhi Undang-Undang Pelayanan Publik seperti tersedianya Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SOP Layanan dan pelaksanaan Survei Kepuasan *Stakeholder*. Perubahan yang perlu dilakukan adalah secara berkala mengevaluasi terhadap standar dan SOP, mendorong pemanfaatan IT dalam pemberian layanan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan pelayanan prima.

Pada kesempatan yang sama, Ronald juga menyampaikan hasil Survey Eksternal hasil Indeks Persepsi Pelayanan Publik Setjen Wantannas mendapat nilai 3,35 (nilai rata-rata 3,35) dan untuk Indeks Persepsi Korupsi memperoleh nilai 3,72 (nilai rata-rata 3,62).\*\*\*\*



# RAKOR WANTANNAS

Pembinaan Bela Negara Melalui Gerakan Nasional Bela Negara

Oleh: Enang Suhendar

Pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Hal itu mempunyai makna bahwa bela negara mempunyai spektrum yang luas. Semua warga negara yang mempunyai profesi apapun mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dalam upaya Bela Negara. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Letjen TNI (Purn) Nugroho Widyotomo ketika memberikan sambutan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Nasional, Jumat, (8/12/2017).

Kegiatan yang bertempat di Gedung Dwiwarna Purwa Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) tersebut bertajuk “Pembinaan Bela Negara Melalui Gerakan Nasional Bela Negara.” Sebagai peserta adalah Pejabat Eselon I dan perwakilan K/L lain khususnya K/L yang merupakan anggota tetap Wantannas.

Melanjutkan sambutannya, Sesjen Wantannas menyampaikan, Bela Negara akan mendidik kader dengan nilai-nilai disiplin, cinta tanah air, etos kerja serta membangkitkan rasa

kenegaraan dan kebangsaan. “Program Bela Negara pada dasarnya ditujukan agar masyarakat Indonesia mempunyai rasa nasionalisme” tutur Sesjen.

Sekaligus pada acara tersebut, Sesjen Wantannas juga menyampaikan isu-isu mengenai Bela Negara yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Lebih lanjut Sesjen mengatakan, telah terjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat mengenai Bela Negara. “Bela Negara bukanlah wajib militer dan milleristik. Bela Negara adalah upaya mengembangkan sikap anak negeri untuk membangun negaranya” tegas Sesjen.

Lebih dalam Sesjen menjelaskan, apapun profesi yang digeluti, merupakan bagian dari upaya Bela Negara. Sebagai contoh, prajurit yang sedang berdinasi di perbatasan atau para diaspora yang sedang berada di luar negeri termasuk bagian dari upaya Bela Negara. Jadi, hal yang keliru bila Bela Negara disebut sebagai program sesaat atau pencitraan.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Rektor Bidang Administrasi, Manajemen Sumber Daya dan Operasi-Sampoerna *University*

Dr. Rima Agristina, SH, MM menyampaikan tentang pola pikir konsepsi pembinaan Bela Negara berdasarkan paradigma nasional agar efektivitas pembinaan bela negara meningkat.

Di sis lain, Haryo B. Rachmadi, SE, M.Si (Han) menyampaikan tentang Modul Utama dan Pelatihan Wisesa Bela Negara. Akademisi Universitas Pertahanan tersebut mengungkapkan bahwa Bela Negara merupakan kewajiban dasar manusia dan bentuk kehormatan bagi setiap warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban.

Beberapa hal penting yang menjadi perhatian dari diskusi yang dimoderatori oleh Dr. Sumantri dari Kedeputusan Politik dan Strategi Setjen Wantannas antara lain perlunya Road Map Bela Negara untuk mengukur target dan capaian pelaksanaan Bela Negara, sedangkan pembinaan Bela Negara dinilai sangat penting dan strategis dihadapkan pada semakin mudarnya nilai-nilai kebangsaan, diperlukan penguatan *standing legal*



Peserta Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Nasional

terkait dengan Bela Negara, dan program Bela Negara perlu di sesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang sedang berkembang, dikemas sedemikian rupa sehingga menarik dan kekinian.

Acara Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Nasional diikuti oleh peserta dengan antusias. Mayoritas peserta Rakor mendukung upaya Pembinaan Bela Negara oleh Wantannas.\*\*\*\*



Sesjen Wantannas Letjen TNI (Purn) Nugroho Widyotomo foto bersama narasumber Rapat Koordinasi Wantannas, Jumat (8/12/2017)

## 1nDONESia

CERDAS  
BERSOCIAL  
MEDIA

Jumat (8/12/2017) bertempat di Ballroom UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin Kav, 8-10, Jakarta Pusat berlangsung kegiatan yang bertajuk 1nDONESia “Cerdas Bermedia Sosial.” Sebagai penyelenggara adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan didukung oleh dengan mengundng beberapa instansi termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang diwakili oleh Billy Septian Arinditya, SH, M.Si.

Fokus pembahasan pada acara itu adalah mengenai media sosial termasuk *Youtube* yang mana pada saat ini banyak disalahgunakan. *Head of Public Policy and Government Relations* Google Indonesia, Shinto Nugroho menjelaskan, *Youtube* merupakan salah satu media sosial yang menampilkan konten berupa audio visual (video), yang dengan mudahnya dapat oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Saking mudahnya, sampai-sampai anak kecil pun tahu bagaimana mengoperasikan *Youtube*.

Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi hal-hal negatif yang kemungkinan terjadi pada anak-anak, saat ini *Youtube* dilengkapi dengan fitur *Machine Learning* yang mampu secara otomatis menilai apakah terdapat konten-konten yang negatif pada perangkatnya. Jika kedapatan, maka *Youtube* akan langsung menutup akses ke konten tersebut.

Bentuk perhatian lain dari *Youtube* yaitu, anak-anak sebagai *user* juga penting untuk diperhatikan. Oleh karenanya, upaya yang

Dilakukan *Youtube* adalah melengkapi perangkatnya dengan fitur *flagging*. Fitur ini dapat membatasi konten video yang bersifat negatif.

Pengguna juga dapat melaporkan kepada pihak *Youtube* apabila menemukan konten negatif tersebut. *Youtube* memiliki fitur mematikan komentar secara otomatis jika terdapat komentar yang mengancam atau komentar negatif lainnya. *Google* Indonesia selalu mendukung segala upaya yang dilakukan sebagai wujud membangun kesejahteraan pendidikan.

Pada kesempatan yang sama, M. Abdulla Daraz dari *Maarif Institute* menjelaskan, *Maarif Institute* ikut berpartisipasi dalam membangun ketahanan sosial (*community resilience*) dari aspek informasi, *hoax* dan kegiatan radikalisme di dunia maya. Salah satu upayanya adalah terselenggaranya kegiatan 1nDONESia ini yang sudah berjalan selama satu tahun di sepuluh kota di Indonesia dengan melibatkan ribuan siswa.

Menurut Daraz, salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah menanamkan rasa kebhinekaan dalam benak dan perilaku anak-anak muda



Indonesia dengan membangun ketahanan sosial dari dunia maya. Kegiatan ini pun erat kaitannya dengan upaya *Youtube* yang memiliki fitur dalam mendukung penggunaan media sosial yang positif. Daraz berharap program ini berdampak besar bagi generasi milenial saat ini khususnya dalam penggunaan media sosial dan cerdas dalam menyerap informasi

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto berpendapat, terkait upaya pertahanan dalam menghadapi *cyber crime* di Indonesia, sebagai contoh kasus Saracen atau yang sejenisnya, harus segera dihentikan. Salah satu cara menghentikannya adalah dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk andil dalam membangun kegiatan yang positif di dunia maya demi menjaga pluralisme di Indonesia.

Hingga tahun 2017, upaya yang sudah dilakukan oleh Polri adalah merubah struktur organisasi dengan membuat tiga biro yaitu Direktorat *Cyber*, Direktorat Keamanan Khusus dan Direktorat Multimedia.

Sedikit mengutip perkataan Presiden RI Joko Widodo, yaitu "Nasionalisme tidak diwariskan, tapi diperjuangkan." Ucapan ini pun menjadi acuan bagi Polri dalam mendukung ketahanan negara termasuk di dunia maya.

Sementara, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Samuel Abrijani menyampaikan hal-hal terkait dengan "Literasi Digital Jaman *Now*." Ia menilai, penggunaan internet saat ini merupakan *extended reality*, maksudnya internet bukan lagi sebagai dunia maya yang terpisah dari dunia nyata.

Dalam hal ini ia mengartikan, internet adalah terusan dari dunia nyata yang kita jalani. Hal ini terlihat dari tren yang terjadi, dimana 262 juta dari penduduk Indonesia, 132 juta nya adalah pengguna internet dan 106 juta nya adalah pengguna media sosial. Dari sisi perbankan, transaksi uang akan lebih banyak dalam bentuk digital atau elektronik.

Fenomena ini adalah tantangan besar yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Seperti maraknya konten-konten negatif. Salah satu cara mengatasi ini semua adalah dengan membuat strategi komprehensif yang bergerak dari hulu ke hilir, yang bisa dimulai dengan edukasi atau literasi digital kepada setiap masyarakat, disusul dengan pendampingan oleh komunitas-komunitas terkait.

Penegakkan hukum oleh pemerintah, juga

**1nDONESIA**  
**"Cerdas Bermedia Sosial"**  
 8 DESEMBER 2017  
**JAKARTA**  
 Thamrin Nine Ballroom  
 Chubb Square, Thamrin Nine, Lantai GF  
 Jalan M.H. Thamrin No. 10, Kebon Meleai, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10230  
 Bekerja sama dengan  
 ID-COP IGA  
 Foto: Kemen Kominfo

merupakan hal yang penting dan diharapkan memberikan efek terhadap penggunaan internet di masyarakat. Perlu diketahui, pengendalian terhadap internet di Indonesia didasari oleh beberapa faktor antara lain hukum dan regulasi, pemantauan proaktif terhadap laporan dari masyarakat, penegakkan hukum yang ada di Indonesia serta teknologi penapisan untuk menyaring konten yang bersifat negatif. Sangat penting bagi masyarakat pengguna internet untuk peduli akan literasi digital ini yang dimaksudkan untuk meminimalisir dampak negatif dari dunia maya.

Masih mengenai 1nDONESIA "Cerdas Bermedia Sosial," Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas (PSMA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI Purwadi Sutanto, mengatakan bahwa Kemendikbud mengartikan Bhineka Tunggal Ika dengan "Berbeda Tapi Bekerja Sama" sehingga program-program yang menumbuhkan rasa gotong royong sangat dibutuhkan saat ini.

Terkait program 1nDONESIA ini, menurutnya adalah salah satu pengimplementasian dari sikap bekerja sama yang dimaksud, dimana para pelajar dikumpulkan untuk memberikan informasi kepada teman mereka sesama siswa di seluruh Indonesia. Para siswa ini nantinya akan memberikan sosialisasi mengenai cerdas dalam bermedia sosial dan memanfaatkan internet sebagai pendukung untuk mengembangkan pengetahuan akademis maupun non akademis. Tujuannya adalah agar generasi muda Indonesia siap dalam menghadapi era digitalisasi yang terus berkembang.\*\*\*\*



## SEJARAH SINGKAT HARI IBU

**G**ema Sumpah Pemuda dan lantunan lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 digelorakan dalam Kongres Pemuda Indonesia, menggugah semangat para pimpinan perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri.

Pada saat itu sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari organisasi pemuda pejuang pergerakan bangsa. Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan pada tanggal 22-25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Salah satu keputusannya adalah di bentuknya satu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia (PPPI).

Melalui PPPI tersebut terjalin kesatuan semangat juang kaum perempuan untuk secara bersama-sama kaum Laki-laki berjuang meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, dan berjuang bersama-sama kaum perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju.

Pada tahun 1929 Perikatan Perkoempoelan Perempuan Indonesia (PPPI) berganti nama menjadi Perikatan Perkoempoelan Istri Indonesia (PPII). Pada tahun 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta. Kongres tersebut disamping berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, juga menetapkan fungsi utama Perempuan Indonesia sebagai Ibu Bangsa, yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya.

Pada tahun 1938 Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Selanjutnya,

dikukuhkan oleh Pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional yang Bukan Hari Libur tertanggal 16 Desember 1959, yang menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan hari nasional dan bukan hari libur.

Tahun 1946 Badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia disingkat KOWANI, yang sampai saat ini terus berkkiprah sesuai aspirasi dan tuntutan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi Kesatuan Pergerakan Perempuan Indonesia.

Hari Ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga jasa perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat dan sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional.

Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai Hari kebangkitan dan persatuan serta kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa.

Untuk itu perlu diwarisi api semangat juang guna senantiasa mempertahankan tekad untuk melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Semangat perjuangan kaum perempuan Indonesia tersebut sebagaimana tercermin dalam lambang Hari Ibu berupa setangkai bunga melati dengan kuntumnya, yang menggambarkan:

- 1 kasih sayang kodrati antara ibu dan anak;
- 2 kekuatan, kesucian antara ibu dan pengorbanan anak; dan
- 3 kesadaran wanita untuk menggalang kesatuan dan persatuan, keikhlasan bakti dalam pembangunan bangsa dan negara.

Semboyan pada lambang Hari Ibu Merdeka Melaksanakan Dharma mengandung arti bahwa tercapainya persamaan kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki merupakan kemitrasejajaran yang perlu diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi keutuhan, kemajuan dan kedamaian bangsa Indonesia.\*\*\*\* (Desi)

**SELAMAT HARI IBU**  
**“PEREMPUAN BERDAYA, INDONESIA JAYA”**

# INI DIA... EMPAT BIDADARI VOLI INDONESIA

Oleh: Yayat Ruhiat

**B**anyak wanita yang menganggap bahwa menjadi seorang atlet umumnya identik dengan keringat, kotor dan panas yang selalu menjadi 'monster' bagi kaum hawa. Namun, siapa sangka bahwa olahraga bola voli memiliki sederet atlet-atlet voli putri berparas cantik bak model dan tidak kalah dengan para artis papan atas sekalipun. Berikut kami rangkum daftar atlet-atlet voli cantik di Indonesia :

## 1. YOLLA YULIANA

Gadis kelahiran Bandung, 16 Mei 1994 ini memulai karir voli sejak duduk di bangku SD. Segudang prestasi telah ia torahkan bersama klub dan juga timnas Indonesia, diantaranya meraih dua kali juara Proliga bersama Elektrik PLN, Juara Liga Voli Indonesia (Livoli) bersama Alko Bandung dan terakhir membawa Indonesia meraih Perak diajang Seagames setelah hampir 20 tahun Indonesia hanya meraih Perunggu. Bakat volinya diwarisi dari ibunya Hj. Mira Mutiara yang juga mantan atlet voli nasional di era 80-an.



## 2. NANDITAAYU SALSABILA

Buah jatuh tidak pernah jauh dari pohonnya. Itulah pepatah yang tepat untuk Nandita Ayu Salsabila pemain Jakarta Pertamina Energi dan Timnas Indonesia ini merupakan putri dari mantan bek Tim Nasional (Timnas) sepakbola era 90-an, Sudirman. Selain ayahnya yang mantan atlet, ibunya juga merupakan mantan atlet Tim Nasional voli tahun 90-an yaitu Tri Wahyuni. Bahkan kedua saudara Nandita juga menekuni dunia olahraga yaitu Tasya



Aprilia (voli) dan Risky M. Sudirman (sepakbola).

## 3. BERLLIAN MARSHEILA

Menjadi Andalan Timnas Voli Indonesia dari usia muda sampai tingkat senior tidak menjadikan Berllian Marsheilla sombong dan tinggi hati. Gadis kelahiran Jakarta 22 Desember 1989 ini telah banyak meraih prestasi di level klub dan nasional. Membawa Jakarta Elektrik PLN, Juara Proliga 3 kali berturut-turut dari tahun 2015–2017, serta persembahkan perak SEA Games 2017 menjadikan Sheilla salah satu legenda hidup voli nasional. Selain voli, sheilla juga mulai menekuni dunia bisnis, ia membuka usaha warung kopi dengan merk Kong DJie yang beralamat di Cakung.



## 4. RINDY PUSPA NINGRUM

Siapa sangka gadis cantik kelahiran Sumedang Jawa Barat ini adalah seorang pemain bola voli dan juga seorang Tentara berpangkat seran dua. Rindy telah menggeluti olahraga bola voli sejak usia 9 tahun. Saat masih duduk di bangku kelas tiga di SD Darangdan, Sumedang. Selama berada dalam pembinaan Persatuan atlet bola voli TNI, Rindy pernah direkrut oleh beberapa klub yang telah memiliki nama besar seperti Bank DKI, Popsivo Polwan, Electric PLN dan beberapa klub besar lain Jasa Promosi Produk *Online* Gratis.



# BANANA NUGGET

Oleh: Desi

### Bahan Adonan:

- 5 buah pisang kepok, lalu lumatkan
- 100 gram tepung terigu
- 1 sdm gula (bila suka)
- 1 butir telur
- 3 sdm susu kental manis
- vanili secukupnya
- 175 gram keju parut
- 1/4 sdt garam
- 100 cc air

### Pelapis:

- maizena dilarutkan dengan air secukupnya
- tepung terigu secukupnya
- tepung roti secukupnya

### Cara Membuat

- Campur semua bahan adonan, kukus hingga matang.
- Potong adonan sesuai selera.
- Baluri dengan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air.
- Baluri dengan tepung roti.
- Panaskan minyak, goreng hingga matang kecokelatan.

Banana Nugget ini bisa juga disajikan dengan susu kental manis atau tambahan topping lainnya.

**Selamat mencoba...**



**Sesjen Wantannas Letjen TNI (Purn) Nugroho Widyotomo dalam acara Rapat Koordinasi Wantannas, Jumat (8/12/2017)**



**Coffee Morning, Senin (18/12/2017)**



**Jam Pimpinan, Senin (11/12/2017)**

Majalah CATRA menerima artikel dan berita tentang suatu kegiatan atau apa saja. Panjang tulisan maksimal 500 kata, jenis huruf Arial, ukuran huruf 12, ukuran spasi 1,5 dan jenis kertas A4. Artikel dikirim dalam bentuk hard dan soft copy dengan format MS. Word ke alamat redaksi Majalah CATRA. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut tanpa mengurangi maksud dari isi tulisan. Artikel yang dimuat akan mendapat imbalan. Informasi lebih lanjut dapat langsung menghubungi Bagian Humas Biro Persidangan dan Humas Setjen Wantannas, Jalan Medan Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110.

# SELAMAT HARI IBU

22 DESEMBER 2017



IBU ADALAH PENDIDIK PERTAMA  
GENERASI BANGSA INI